

SUTAN SJAHRIR, SOSIALISME, DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1927-1962

HANIF SETIAWAN

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: hanifsetiawan94@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Sutan Sjahrir merupakan salah satu tokoh pemegang peranan penting dalam proses berdirinya Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri pertama RI, Sjahrir lah yang pertama kali menegakkan politik Luar Negeri yang Bebas dan Aktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan riwayat hidup Sutan Sjahrir serta menganalisa pemikiran Sjahrir terutama mengenai Sosialisme Kerakyatan. Maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut, pertama mengenai latar belakang, riwayat hidup dan pemikiran sosialisme kerakyatan Sutan Sjahrir. Kedua, perjuangan Sutan Sjahrir dalam memerdekakan Indonesia. Ketiga, perjuangan serta kegiatan Sjahrir setelah tidak menjabat dalam pemerintahan. Ada pun tahapan yang digunakan dalam merekonstruksi sejarah ini, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Sutan Sjahrir adalah seorang negarawan yang segala tindakan, strategi, dan juga pengetahuannya adalah untuk kemajuan serta kemerdekaan rakyat Indonesia dalam jangka panjang. Ia memiliki cara pandang yang melampaui zamannya pada masa itu. Ketika nasionalisme menjadi pegangan garis perjuangan, Sjahrir menekankan bahwa tanpa demokrasi, nasionalisme bisa bersekutu dengan feodalisme. Menurutnya, humanisme jauh lebih penting dari segala-galanya, karena jika tanpanya, maka yang terjadi hanyalah sebatas memerdekakan dan mensejahterakan diri sendiri.

Kata Kunci : Sjahrir, Sosialisme, Kemerdekaan

Abstract

Sutan Sjahrir is one of the figures who played an important role in the process of forming the Republic of Indonesia. As the first Prime Minister of Indonesia, it was Sjahrir who first upheld the Free and Active Foreign policy.

This research aims to describe the life history of Sutan Sjahrir and analyze Sjahrir's thoughts, especially regarding Popular Socialism. Then the problem was formulated as follows, first about the background, biography and thoughts of popular socialism by Sutan Sjahrir. Second, Sutan Sjahrir's struggle in liberating Indonesia. Third, the struggle and activities of Sjahrir after not serving the government. The stages used in reconstructing this history, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

Based on the results of the study, concluded that Sutan Sjahrir was a statesman whose actions, strategies and knowledge were for the long-term progress and independence of the Indonesian people. He has a perspective that goes beyond his era at that time. When nationalism became the guiding line of struggle, Sjahrir emphasized that without democracy, nationalism could be allied with feudalism. According to him, humanism is far more important than everything, because without it, what happens is only limited to freeing and prospering oneself.

Keywords: Sjahrir, Socialism and independence

PENDAHULUAN

memiliki peranan besar dalam proses berdirinya negara ini, namun saat ini banyak yang telah melupakan perjuangannya. bahkan generasi muda saat ini banyak yang tidak lagi mengenal sosoknya.

Dalam proses berdirinya bangsa ini Sjahrir memikul tugas yang sangat berat. Sjahrir merupakan perdana menteri pertama Indonesia yang tentunya memiliki tugas besar dalam membangun bangsa ini, terlebih lagi adanya penjajah yang datang kembali untuk menguasai bangsa ini.

sosialisme merupakan gagasan politik kiri pada masa itu yang menjadi representasi pemikiran progresif di kalangan kaum terpelajar Indonesia dalam menghadapi kolonialisme yang dianggap perkembangan lanjut dari kapitalisme.

Y.B. Mangunwijaya berpendapat bahwa fungsi dan jasa Sjahrir adalah menjadi pemikir dan perdana menteri pertama yang tenang dan harus menjawab tuntutan wajibnya serta melihat jauh ke depan. Ia merupakan pelengkap paling tepat dan vital di kala itu dalam diri Sukarno-Hatta. Sjahrir merupakan Perdana menteri yang berpikir dingin, tokoh yang bersih dari noda kolaborasi Jepang dan revolusioner. Hal ini diakui hampir seluruh pemimpin rakyat ketika itu, termasuk Sukarno-Hatta dan para pelopor pemuda, kecuali yang berhaluan komunis atau yang percaya kerja fasis karena mereka sudah punya resep tersendiri.¹

Sjahrir menjadi pemimpin, seperti ketua KNIP dan Badan Pekerja. Hal ini tidak diperoleh dengan merebut dari tangan orang lain, tetapi karena kepercayaan para pemuda saat itu. Sjahrir memahami bahwa situasi sudah berubah dan karena itu ia menerima daulat pemuda-pemuda. Sikap ini sering kali ditafsirkan sebagai 'kebimbangan'. Padahal, untuk memahami situasi dunia internasional maka sikap ini merupakan keniscayaan karena yang dibutuhkan adalah tokoh non-Jepang murni. Begitu ia masuk sidang langsung menjadi ketua baru dengan suara mayoritas.

Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa Sjahrir sebagai aktivis kemerdekaan selama zaman Jepang yang diakui para pemuda. Aksi-aksinya di bawah tanah yang memaksanya harus bersembunyi dan sering kali bertindak di bawah empat mata telah menghasilkan efek politik praktis, paling tidak di kalangan pemuda terkemuka dan Sukarno-Hatta. Kepercayaan yang begitu besar dan hampir tanpa sikap hati-hati dalam situasi kritis sepanjang bulan Oktober-November 1945 menentukan segala-galanya bagi masa depan bangsa. hal ini tentu mempunyai landasan moral dan rasional yang sangat kuat. Intuisi (daya atau kemampuan mengetahui) para pemimpin muda dan tua merasa bahwa pada situasi saat itu Sjahrir merupakan orang tepat tidak hanya sebagai pengganti Sukarno-Hatta, tetapi pelengkap "triumvirat de facto" Sukarno-Hatta. Intuisi mereka murni, tidak tercemar sedikit pun oleh pandangan politik kotor, ambisi pribadi, atau permainan klik ketika para pejuang sudah masuk ke berbagai kota lagi, dan perjuangan membawa sekian petualang untuk saling berebut hasil pada tahun-tahun pertama 1945-1950.

Sutan Sjahrir merupakan salah satu tokoh yang Sebelum itu, para pemimpin rakyat terpengaruh oleh ide manifes politik Sjahrir, Perjuangan Kita, yang terbit pada bulan Oktober 1945. Saat itu mereka hanya mengenal keikhlasan untuk menyelamatkan republik yang baru tiga bulan terbebas dari teror penjajah maupun tendensi anarkis dari Indonesia sendiri yang membalas teror dengan teror. Selama bulan Oktober-November 1945 semangat yang bersemboyan "Merdeka atau Mati" sudah dirasakan begitu ironisnya, namun tidak memberikan garansi keberhasilan suatu revolusi. Akal sehat menyadari bahwa yang dibutuhkan hanya "merdeka atau hidup".

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa justru para pemuda mendukung Sjahrir, meski Perjuangan Kita sarat dengan kritik keras terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa Sjahrir memiliki sesuatu yang bersendi fondasi kuat, tidak lapuk oleh kekosongan untuk menghasut ketika itu, tetapi segar, muda, bijaksana, menjangkau jauh ke depan tanpa melupakan situasi yang mendesak, meyakinkan semua. Manifes Perjuangan Kita mengerutkan dahi hampir setiap pemimpin dan pelopor, terutama mereka yang bekerja sama dengan Jepang karena menjadi sasaran kritiknya.² Hanya Sjahrir satu-satunya pemimpin yang mempunyai konsep dasar yang bijaksana dan strategis, konsisten, dan menyeluruh, tentang apa yang harus dikerjakan dalam menghadapi lautan api teror Belanda dan dunia internasional. Bahkan, pandangannya begitu jauh sehingga jika kita sekarang-sekian puluh tahun sesudah 1945-membaca ulang tulisan-tulisan Sjahrir, maka hampir setiap kalimat bisa langsung kita gunakan, seolah-olah tulisan tersebut tidak ditulis waktu itu, tetapi sekarang, dan bukan hanya tertuju kepada bangsa Indonesia, melainkan setiap penguasa negara-negara berkembang bekas koloni.

Sjahrir mencerminkan seorang negarawan yang bijaksana, yang tidak hanya berlaku untuk pejabat-pejabat Belanda, tetapi juga untuk setiap pemerintah bangsa bekas koloni, terutama orang yang mengira bahwa hanya dengan "politik kesejahteraan" rakyat akan terpesona untuk berterima kasih melihat pembangunan-pembangunan fisik, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, seperti pemikiran Belanda sebelum Perang Dunia II dan sesudahnya yang mencoba membangun politik Etis untuk bangsa Indonesia. Ada sesuatu yang lebih dalam pada permasalahan bangsa Indonesia, dan itu secara tajam dapat dilihat oleh Sjahrir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Sjahrir Dan Pemikiran Sosialisme Kerakyatan

Sjahrir merupakan putra dari pasangan Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat sultan Deli dan kepala jaksa (landraad) di Medan. Sjahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus yang merupakan aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.

¹ Yanto Basri dan Retno Suffatni (ed). 2004. Sejarah Tokoh Bangsa, Yogyakarta: Lkis. hal 74-75

² *Ibid.* hal 78-79

Sjahrir lahir di Padangpanjang, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 1909, Sjahrir dibesarkan di Medan. Sjahrir mengenyam pendidikan sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan. Sjahrir menyelesaikan sekolah di MULO pada tahun 1926, kemudian Sjahrir masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung. Sjahrir juga bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia di Bandung (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan sesekali menjadi aktor. Perolehan yang didapat dari pementasan itu dipakai untuk membiayai sekolah yang didirikannya bersama anggota-anggota Batovis yaitu Tjahja Volksuniversiteit (Cahaya Universitas Rakyat).

Sewaktu Sjahrir tiba di Bandung pada tahun 1926, terdapat Laporan-laporan yang mencemaskan tentang percobaan pemberontakan Komunis yang berpusat di Batavia, Jawa Barat, dan di tanah kelahiran Sjahrir, Minangkabau, laporan itu dimuat dalam buletin *Algemene Indische Dagblad (AID)* yang diterbitkan di penghujung tahun 1926 dan di awal tahun 1927.³

Teman-teman Sjahrir menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 1927, Sjahrir termasuk orang yang membentuk himpunan kaum nasionalis Jong Indonesia. Yang kemudian di penghujung tahun 1928, Jong Indonesia telah menyebar di luar wilayah Bandung yaitu Batavia, Yogyakarta, dan Surabaya. Kegiatan khusus Jong Indonesia, yaitu menyelenggarakan sekolah sendiri yaitu Tjahja Volksuniversiteit. Tujuan Jong Indonesia adalah untuk mendorong gagasan kesatuan nasional Indonesia melalui gerakan pramuka, olahraga, jurnal, selebaran dan pertemuan atau rapat-rapat.⁴

Sjahrir menyelesaikan studinya di AMS Bandung pada tahun 1929. Ia melanjutkan studinya di Universitas Amsterdam, di fakultas Hukum. Di Amsterdam, garis pemisah antara warga negeri penjajahan dan penduduk wilayah jajahannya tak terlihat sama sekali.⁵

Ketika Sjahrir di Belanda, Hatta telah berada di sana selama delapan tahun dan masih belajar di Sekolah Bisnis di Rotterdam. Ia adalah ketua Perhimpunan Indonesia, suatu organisasi mahasiswa patriotik dari Hindia yang berpusat di Negeri Belanda.⁶ Di tahun 1929, Hatta semakin gelisah untuk secepatnya menyelesaikan studinya dan kembali ke Hindia. "Pada waktu itu, Hatta berkata "Saya telah menjelaskan bahwa saya akan berhenti sebagai ketua (Perhimpunan Indonesia), dan saya telah mendidik kader-kader baru untuk menggantikan saya

Di bawah bimbingan Hatta, Sjahrir memasuki Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1929, Hatta melepaskan jabatannya dan Abdullah Sukur dipilih sebagai pengantinya. Pada pertemuan yang diadakan oleh Perhimpunan Indonesia tanggal 4 Februari 1930, nama Sjahrir sudah tercantum dalam laporan polisi sebagai pembicara utama dalam pertemuan itu. Dua minggu

kemudian, dia dipilih menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia. Pada bulan Mei 1930, Sjahrir sudah menjadi orang kedua setelah ketua.

B. Peran Sjahrir Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia

a. Sebelum Kemerdekaan

Pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah kolonial Belanda menangkap Sukarno dan tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan pihak Belanda menganggap bahwa Sukarno dan anggota partainya melakukan kegiatan revolusioner untuk melawan pihak Belanda. Bagi Hatta dan Sjahrir, penangkapan tersebut menyurutkan semangat kaum pergerakan dan kejadian tersebut merupakan suatu sinyal bahwa keadaan di Tanah Air sedang menghadapi masalah serius. Terlebih setelah mendengar bahwa PNI justru dibubarkan oleh aktivisnya sendiri, yang kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo). dimana Gerakan nasionalisme kultural Partindo dinilai terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis, mereka berharap ada tokoh yang lebih berani.⁷ Para anggota yang kecewa dengan dibubarkannya PNI membentuk *studieclub*. mereka menyebut diri mereka sebagai Golongan Merdeka. Sejak bulan Juni 1931 Hatta dan Sjahrir mulai menunjukkan dukungan bagi Golongan Merdeka. Pada akhir bulan September atau awal Oktober 1931, club-club tersebut membentuk Komite Golongan Merdeka di Batavia. Komite tersebut mengadakan pertemuan Golongan Merdeka di Batavia pada tanggal 31 Oktober 1931. Acara pokoknya adalah membentuk suatu partai baru. Yang kemudian memutuskan untuk membentuk suatu wadah bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan PNI-Baru atau PNI Pendidikan. Tugas utama partai tersebut untuk sementara adalah mendidik calon pemimpin pergerakan kebangsaan.⁸

Sjahrir tiba di Hindia Belanda pada tahun 1931. Kehadirannya kembali di tanah air menjadi suatu tahap baru dalam perkembangan politiknya. Dari pendidikan di Belanda dia telah memperoleh kebiasaan untuk melakukan analisis yang tajam, menggunakan logika yang tidak sentimental, dan kesediaannya untuk melancarkan kritik yang tajam terhadap hal-hal yang dianggapnya tak berharga.⁹

Hatta dan Sjahrir bergabung dengan kelompok nasionalis Golongan Merdeka. Jalan Politik yang diambil Sutan Sjahrir, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh jiwa patriotik dan pemikirannya yang menjunjung tinggi persamaan derajat setiap manusia. Menurut Sutan Sjahrir nasionalisme harus berpijak pada demokrasi, karena nasionalisme bisa tergelincir pada fasisme jika bersekutu dengan feodalisme lokal. Nasionalisme juga bisa menjadi chauvinistik dalam hubungan internasional, jika tidak dilandasi pemikiran humanistik (kemanusiaan).

Setelah bangsa Belanda kalah oleh Jerman, rakyat Indonesia merasa kegirangan karena menganggap Jepang

³ Rudolf Mrázek. 1996. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hal 63-64.

⁴ *Ibid.* hal 69.

⁵ Syahbuddin Mandaralam. *op. cit.* hal 14.

⁶ *Ibid.* hal 109

⁷ TEMPO, Edisi 9-15 Maret 2009. hal 28

⁸ *Ibid.* hal 349

⁹ J.D. Legge, 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan ; Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal 57-58.

sebagai penyelamat mereka dari penjajahan Belanda pada waktu itu.¹⁰

Pihak Jepang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan aparat pemerintahan, padahal kepentingan mereka untuk menenangkan rakyat sangat mendesak kalau peperangan ingin terus berlangsung tanpa gangguan. Pada mulanya Jepang mencoba memanfaatkan elemen-elemen feodal dan agama guna memperoleh dukungan. Ketika usaha tersebut gagal, mereka berpaling kepada Hatta dan Sjahrir.

Sjahrir dan Hatta berkesimpulan bahwa berperan serta dalam pemerintahan yang disponsori Jepang akan membantu mempersatukan kegiatan kaum nasionalis dan kaum revolusioner yang berpecah guna mencapai kemerdekaan. Keduanya bersepakat untuk sementara waktu Hatta bekerja sama dengan pihak Jepang, sedangkan Sjahrir akan memimpin pengorganisasian gerakan revolusioner bawah tanah yang terkoordinasi.

Karena itu, ketika pada akhir tahun 1943, Jepang mendekati Hatta untuk diminta kerja samanya, Hatta menyetujui dengan syarat ia diperbolehkan mengorganisasi pembangunan bangsa Indonesia. Keadaan mereka yang sulit dan kesadaran akan pentingnya pemimpin yang populer seperti Hatta membuat Jepang dengan mudahnya menerima syarat-syarat yang diajukan Hatta. Akan tetapi, mereka gagal ketika mengharapkan kerja sama Sjahrir dengan cara serupa. Sjahrir memberi alasan bahwa dirinya terlalu disibukkan oleh kegiatan 'pendidikannya' untuk memikirkan hal-hal lain, alasan yang dikemukakan hanya untuk 'menutupi' kegiatannya di bawah tanah.

Pada bulan Juli tahun 1942, Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, mengadakan pertemuan rahasia di kediaman Hatta. Pada pertemuan itu Sukarno menyetujui rencana yang telah dipikirkan secara matang oleh Hatta dan Sjahrir. Akhirnya diputuskan bahwa Sukarno-Hatta akan menawarkan kerja sama mereka dengan pihak Jepang, melindungi roda pemerintahan dari campur tangan Angkatan Perang Jepang, dan menyediakan basis legal yang luas bagi perjuangan nasional sambil secara rahasia membantu gerakan perlawanan revolusioner pimpinan Sjahrir dengan memberikan informasi dan juga uang.¹¹

Pada bulan Oktober 1944, menyusul pernyataan Perdana Menteri Koiso di Parlemen Jepang bahwa Indonesia akan segera diberi kemerdekaan, Sukarno-Hatta dan yang lain-lainnya diizinkan untuk secara terbuka menganjurkan kemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan yang berbasis luas di Jawa dibentuk. Setelah mengadakan sidang secara rutin pada bulan Mei, Juni, dan Juli, Panitia tersebut berhasil mencapai keputusan-keputusan mengenai soal-soal ekonomi dan konstitusi.¹²

b. Peran Sjahrir Untuk Mencapai Kemerdekaan

Ketika Kekaisaran Jepang sudah mendekati keruntuhannya, pada tanggal 8 Agustus Sukarno dan Hatta dipanggil ke Saigon untuk bertemu dengan Pangeran Terauchi, Panglima Tertinggi Tentara Jepang Wilayah

Selatan. Pesan yang disampaikan oleh Terauchi adalah bahwa penentuan waktu serah terima kemerdekaan sekarang berada di tangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, disitu diputuskan bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan harus bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. Sebelum berangkat ke Saigon, Hatta dan Sjahrir telah sepakat bahwa saat yang menentukan bagi usaha revolusioner besar-besaran, yaitu secara terang-terangan menggabungkan berbagai kekuatan legal di bawah Sukarno-Hatta dan gerakan bawah tanah dalam usaha mendirikan negara Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 14 Agustus rombongan kembali ke Jakarta tanpa mengetahui perihal telah dijatuhkannya bom atom yang pertama serta akan menyerahnya Jepang, dan langsung terlibat dalam perdebatan sengit tentang strategi yang akan ditempuh untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada mulanya, Sjahrir merupakan salah satu peserta utama dalam perdebatan itu.¹³ Ketika berita menyebar pada rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 14 Agustus Jepang telah menyerah kepada Sekutu, diam-diam Hatta berunding dengan Sjahrir yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan harus diadakan sesegera mungkin karena jika menunggu tanggal 19 Agustus mungkin akan terlambat.¹⁴

Sjahrir memberitahu Hatta yang baru kembali dari Saigon bahwa Jepang sudah menyatakan kesediaan untuk menyerah, dan berusaha keras meyakinkan Hatta mengenai pentingnya deklarasi kemerdekaan dilakukan segera oleh Sukarno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, sehingga dikemudian hari tidak akan timbul kesan seolah-olah Indonesia memperoleh kemerdekaannya sebagai hadiah dari Jepang. Hatta tidak dapat diyakinkan sepenuhnya, tetapi ia membawa Sjahrir ke rumah Sukarno untuk membicarakan soal itu lebih lanjut. Sukarno maupun Hatta khawatir bahwa langkah yang tergesa-gesa akan memancing tindak kekerasan dari pihak Jepang untuk menumpas republik yang mengumumkan kemerdekaannya secara sepihak. Menurut Hatta, Sukarno meragukan apakah Jepang benar-benar sudah menyerah, dan ingin memperoleh sekurang-kurangnya, suatu persetujuan tidak resmi dari pihak berwajib sebelum bertindak. Mereka berdua berpendapat bahwa pernyataan kemerdekaan harus dikeluarkan oleh Panitia Persiapan yang akan melangsungkan sidang peresmiannya pada tanggal 18 Agustus. Sjahrir berpendapat bahwa jika Jepang telah meminta damai maka negara itu, sebenarnya tidak lagi berada dalam posisi untuk menepati janjinya memberikan kemerdekaan, apakah itu melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dengan cara lain. Ia juga mengisyaratkan bahwa sudah ada rencana bagi suatu pemberontakan rakyat dalam skala yang tidak akan dapat dikendalikan oleh pihak Jepang untuk mendukung proklamasi kemerdekaan itu. Pada akhir pembicaraan itu, Sukarno tetap pada keputusannya untuk menunggu sampai diselenggarakannya sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

¹⁰ P. R. S. Mani, 1989. *Jejak Revolusi 1945 ; Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hal 68.

¹¹ *Ibid.* hal 69-71.

¹² *Ibid.* hal 77

¹³ J.D. Legge, op. cit, hal. 171.

¹⁴ P. R. S. Mani, op. cit. hal 82.

Di zaman Jepang pemuda dan mahasiswa di Jakarta berhimpun di tiga lokasi, yakni Asrama Prapatan 10 yang menjadi tempat tinggal mahasiswa kedokteran Ika Dai Gaku (Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran), Asrama Angkatan Baru Menteng 31 yang didirikan oleh Sendenbu (Badan Propaganda Jepang), Asrama Indonesia Merdeka di Jalan Bungur Besar yang didirikan oleh kalangan Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Ada pusat-pusat kegiatan lain, seperti Asrama Mahasiswa USI (Unitas Studiosorum Indonesiesis) di Cikini 71, atau Komisi Bahasa Indonesia dibawah pimpinan Sutan Takdir Alisjahbana, bertempat di Penerbit Balai Pustaka.¹⁵

Menyangkut kegiatan pemuda, tampuk (ujung) pimpinan terlepas dari tangan Sjahrir dan beralih ke tangan berbagai pemimpin pemuda lainnya, di antaranya adalah Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh, Maruto Nitimihardjo, Wikana dan wakil-wakil yang lain dari asrama mahasiswa kedokteran di Prapatan 10. Di antara mereka terdapat beberapa pengikut Sjahrir. Sebagai hasil diskusi di antara kelompok-kelompok itu maka diputuskan bahwa pandangan mereka harus disampaikan langsung kepada Sukarno, maka sebuah delegasi yang dipimpin oleh Wikana menemui Sukarno di tempat tinggalnya di Pegangsaan Timur 56 pada malam hari tanggal 15 Agustus. Pada waktu perdebatan sengit antara Sukarno dan para mahasiswa tersebut, Sukarno tetap teguh tidak mau mengalah. Para pemuda itu akhirnya meninggalkan rumah Sukarno dengan perasaan jengkel, mereka juga mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Pembicaraan pada malam hari tanggal 15 Agustus yang menghasilkan keputusan untuk menculik kedua pemimpin yaitu Sukarno dan Hatta, yang dilangsungkan di Asrama Baperpi di Cikini 71. Sejumlah pengikut Sjahrir, yaitu Soebadio Sastrosatomo, ikut serta dalam peristiwa tersebut. Sjahrir diberitahu tentang rencana-rencana tersebut tetapi, ia menolak untuk ambil bagian di dalamnya. Para pemuda kemudian memindahkan Sukarno dan Hatta ke kota kecil Rengasdengklok, di mana mereka juga tidak berhasil membujuk Sukarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mereka kalah, para penculik itu mengizinkan mereka dibawa kembali ke Jakarta pada malam tanggal 16 Agustus, di mana setelah diadakan kontak-kontak yang halus dan benar-benar informal dengan pihak berwajib Jepang, Sukarno dan Hatta mengadakan pertemuan dengan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan sejumlah pemimpin pemuda di rumah Laksamana Maeda dan menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan yang akan diumumkan esok paginya.¹⁶

Sjahrir tidak ikut hadir di rumah Laksamana Maeda pada malam hari tanggal 16 Agustus ketika rumusan proklamasi dirancang, demikian juga ia tidak hadir di rumah Sukarno pada pagi hari tanggal 17 Agustus waktu proklamasi itu dibacakan. Ia menyatakan tekadnya agar republik yang merdeka bebas dari kesan sebagai ciptaan Jepang. Tetapi, kepeduliannya tidak hanya beranggapan bahwa nasionalisme hanya berarti perjuangan untuk

membebaskan diri dari kekuasaan asing. Baginya, kemerdekaan berkaitan dengan wawasan-wawasan tentang kebebasan individu dan perubahan sosial yang dapat menjadikan kemerdekaan itu sebagai suatu kemerdekaan yang sejati. Cita-cita ini mempengaruhi pandangannya mengenai cara pencapaian kemerdekaan itu. Adalah mungkin bagi kaum nasionalis murni, dan bahkan juga kaum nasionalis muslim, untuk memandang pendudukan Jepang sebagai suatu periode dengan kesempatan untuk memperoleh kesempatan dari pihak penjajah. Tetapi, dalam perspektif Sjahrir, Jepang diidentifikasi sebagai bagian dunia fasis dan sebagai tantangan kaum reaksioner terhadap nilai-nilai demokrasi serta perubahan sosial yang diinginkan.

Sejak dulu Sjahrir telah menyadari kemungkinan-kemungkinan otoriterisme yang melekat pada sebagian besar pemikiran kaum nasionalis yang memandang negara sebagai sesuatu yang memungkinkan pemenuhan diri individu. Hal itu dapat menjadi lebih menonjol dalam situasi aksi massa. Aksi-aksi pemuda yang tidak memiliki perspektif ideologis yang cukup matang, paling tidak akan menuju kepada situasi anarki dan dalam keadaan yang paling buruk, dapat mendorong, munculnya sikap-sikap fasis, suatu kemungkinan yang dipertajam oleh sifat anti Barat.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks Proklamasi disusun sehari sebelumnya di rumah Laksamana Maeda oleh Sukarno bersama Hatta, Soebardjo, Nishijima (ajudan Maeda), dan dua orang Jepang lainnya. Lima hari setelah kemerdekaan diumumkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang beranggotakan 137 orang, dibentuk. Kelompok pemuda mendesak supaya Sjahrir menjadi Ketua Komite tetapi ia menolak. Ia masih menanti sejauh mana Komite tersebut mencerminkan kehendak rakyat.

Pada bulan-bulan pertama setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintahan kabinet presidensial dipimpin kaum nasionalis pro-Jepang. Kondisi ini membuat Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II, setelah merobohkan Jepang, sulit mengakui keberadaan Republik Indonesia. Sekutu menganggap Indonesia masih di bawah kendali Jepang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, 40 orang anggota Komite Nasional menandatangani petisi untuk Presiden Sukarno. Mereka menuntut Komite menjadi badan legislatif, bukan pembantu Presiden. Selain itu, menteri kabinet harus bertanggung jawab kepada Dewan, bukan Presiden.

Ibu Sri Mangoensarkoro disertai dua pemuda, yaitu Soebadio dan Soekarni mendesak Sjahrir supaya mau memimpin Komite. "Komite harus bersih dari Jepang dan revolusioner," kata Soekarni. Sjahrir kemudian menerima usulan para pemuda tersebut. Rapat Komite Nasional kedua pada tanggal 16 Oktober 1945 merupakan salah satu titik penting perjalanan politik Sjahrir. Pada tanggal 25 Oktober 1945 Sjahrir diterima menjadi salah seorang anggota KNIP, sekaligus dipilih dengan suara bulat untuk menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP sedangkan wakilnya

¹⁵ H. Rosihan Anwar. 2010. Sutan Sjahrir : Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, KITLV Press. hal 49.

¹⁶ J.D. Legge, op. cit. hal 172-174

adalah Amir Sjarifuddin. Dengan demikian sebenarnya terjadi penyegaran personalia dan penyempurnaan organisasi KNIP. Badan itu lebih mencerminkan aspirasi-aspirasi dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Rapat yang dihadiri Wakil Presiden Mohammad Hatta berlangsung ricuh. Saling serang terjadi antara kelompok pro dan kontra Jepang. Kendati demikian, kedua kubu sama-sama menyadari usaha untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka menghadapi rintangan berat.

Belanda, yang merupakan bagian dari Sekutu belum menerima kemerdekaan Indonesia. Sjahrir, yang sebelumnya sudah memprediksi sikap Sekutu itu berpendirian, menghadapi Belanda, termasuk Sekutu, tidak bisa lagi dengan senjata, tapi harus lewat diplomasi.¹⁷ Sebagai ketua KNIP yang baru, Sjahrir mengarahkan agar hendaknya keanggotaan KNI (Komite Nasional Indonesia), baik di pusat maupun di daerah-daerah, lebih mencerminkan aspirasi politik nasional. Dan sejalan dengan itu, atas saran Sjarir selaku ketua KNIP, wakil presiden yaitu Hatta pada tanggal 3 November 1945 mengumumkan Maklumat X tentang pembentukan partai-partai di Indonesia.

Bagi Sjahrir Negara Republik Indonesia harus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan demokrasi, apalagi karena harus mengantisipasi segala kemungkinan berkaitan dengan keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Masalahnya mendesak karena Sekutu yang diboncengi agen dan serdadu NICA sudah datang untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Salah satu masalah yang berkembang saat itu adalah bahwa Sekutu akan mengadili para penjahat perang, termasuk para pemimpin Indonesia yang berkolaborasi dengan fasisme Jepang sehingga jalan keluar satu-satunya adalah Republik Indonesia haruslah memiliki suatu lembaga legislatif yang merupakan lembaga yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kelompok-kelompok politik yang hidup dalam masyarakat Indonesia bebas dari pengaruh (fasisme) Jepang. Selain itu pemerintah juga harus dipimpin oleh tokoh Indonesia yang anti fasisme Jepang.

Berkaitan dengan itu hendaknya dimaklumi bahwa kedatangan Sekutu ke Indonesia antara lain menyertakan Van Der Plas yang juga datang untuk menyusun kembali pemerintah penjajahan Belanda atas Indonesia. Kedatangan Sekutu itu diwarnai dengan isu-isu bahwa Republik Indonesia adalah ciptaan fasisme Jepang, sedangkan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang pernah berkolaborasi dengan pemerintah militer Jepang akan diadili sebagai penjahat perang.

Setelah keluarnya Maklumat X dan berdirinya partai-partai maka komposisi keanggotaan KNIP diperluas lagi dengan wakil-wakil dari partai-partai. KNIP pun lebih mencerminkan suatu lembaga dengan keanggotaan dan fungsi legislatif yang mencerminkan aspirasi-aspirasi (kelompok politik) yang hidup, apalagi karena kepala pemerintah (Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada

KNIP.¹⁸ Presiden tidak lagi berhak membuat undang-undang. Mulai saat itu juga Komite menjadi badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Maklumat Nomor X menandakan berakhirnya kekuasaan luar biasa Presiden dan riwayat Komite Nasional sebagai pembantu Presiden.

Prestasi Sjahrir di dalam KNIP membuktikan bahwa ia memahami secara mendalam masalah Negara Republik Indonesia yang baru lahir serta tahu apa saja yang harus dilakukan. Lagi pula ia mendapat dukungan kuat di KNIP. Sjahrir pun menyusun dan memimpin suatu kabinet parlementer yakni yang bertanggung jawab kepada legislatif (dalam hal ini KNIP). Banyak yang setuju dan juga tidak setuju dengan Sjahrir. Tetapi sejarah memperlihatkan, begitu dia menjadi Ketua Badan Pekerja Komite Nasional, lahir Maklumat Nomor X yang memungkinkan lahirnya partai-partai politik di Indonesia.¹⁹ Ketika terjadi pendaratan pasukan Sekutu secara besar-besaran di bawah Panglimanya yaitu Jenderal Philips Christison, yang ternyata diboncengi tentara-tentara Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia, maka susunan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia sudah mencerminkan kehidupan politik yang demokratis.²⁰

C. Dampak Dan Pengaruh Sutan Sjahrir Pasca Kemerdekaan Indonesia

Perpecahan antara Sjahrir dan Amir Syarifuddin disebabkan karena Amir Syarifuddin menambahkan faham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis sedangkan Sutan Sjahrir berserta kelompoknya menolak dengan tegas pemahaman tersebut. Dalam pemikiran Sutan Sjahrir, penambahan faham komunisme pada prinsip utama yang menjadi landasan Partai Sosialis tersebut akan mempengaruhi arah pemerintahan yang totaliter. Dengan demikian sangat bertentangan dengan pemikiran politik Sutan Sjahrir yang menekankan adanya kebebasan, universalitas humanis dan sosialis kerakyatan. Setelah keluar dari Partai Sosialis, pada tanggal 12 Februari 1948 Sutan Sjahrir bersama teman-temannya mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Partai Sosialis Indonesia merupakan partai politik yang beranggotakan tokoh-tokoh intelektual Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam kelompok Pendidikan Nasional Indonesia; sebuah partai yang bertujuan untuk ikut meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh utama yang berperan besar dalam membentuk pemikiran politik kelompok dan partai ini ialah Sutan Sjahrir, Soedjatmoko, Saleh Mangoendingrat, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Siti Wahyoenah Saleh Mangoendingrat, Hoengeng I, Santoso, Lintong Moelia Sitorus, Soebianto Djojohadikoesoemo, Daan Jahja, Aboebakar Loebis, Wibowo, serta Ali Boediardjo.²¹ Bagi Sutan Sjahrir

¹⁷ Djoeir Moehamad dan Mochtar Lubis (ed). 1997. Memoar Seorang Sosialis. Jakarta: Obor. hal 97.

¹⁸ Ibid. hal 98.

¹⁹ TEMPO. op. cit. hal 44-45.

²⁰ Djoeir Moehamad dan Mochtar Lubis (ed). op. cit. hal 99.

²¹ P.Y. Nur Indro. 2009. Pemikiran Politik Soetan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia : Tentang Sosialisme Demokrat, Bandung:

demokrasi merupakan jiwa perjuangan bangsa. Dalam pemikirannya, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan kepada nasionalisme tetapi kepada faham demokrasi. Dengan demikian kebebasan dari hasil perjuangan tersebut dapat dimiliki oleh segenap rakyat Indonesia.²²

Selama berbulan-bulan setelah perpecahan dengan Amir Sjarifuddin, Sjahrir dan rekan-rekannya berulang kali mengingatkan bahwa belum waktunya untuk sengaja mempertajam perjuangan kelas di Indonesia, dan bahwa kebijakan perjuangan kelas harus dihindari. Seperti dirumuskan di dalam Manifesto partai baru Sjahrir di bulan Februari 1948; “bahaya bentrokan dari kelompok dan barisan harus dijauhkan”.

Dalam pedomannya di bulan Maret 1948, Sjahrir menulis bahwa karena partainya diprakarsai atau dipelopori oleh bekas anggota Pendidikan Nasional Indonesia, maka begitu partai melepaskan diri dari Amir, partai mereka dapat kembali setia kepada tradisi kadernya. Di bulan Juni 1948, Sjahrir menegaskan kembali bahwa “Kita tidak berusaha untuk memperluas massa partai kita, karena hal yang demikian pasti akan mempertajam perjuangan partai”.²³

Di negeri seperti Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai feodalisme, fasisme, otoriterisme, maka yang perlu diprioritaskan adalah pembinaan demokrasi. Apabila melihat kenyataan tadi, maka jelas bahwa membangun suatu masyarakat sosialis tidak gampang. Sjahrir memilih untuk bersikap realistik, ia menjadi lebih bijaksana, sederhana, ingat perlunya berkepala dingin.²⁴ Ia menamakan ideologi yang dipikirkannya dan dianutnya yaitu “Sosialisme-Demokrasi”, yang lebih sering disebut sebagai “Sosialisme-Kerakyatan”. Dalam memahami Sosialisme-Kerakyatan tampaknya kata kuncinya adalah Kemanusiaan. Ketika menjabat sebagai Perdana Menteri (1945-47) kata “Kemanusiaan” itu sering dipergunakan dalam pidato-pidato Sjahrir. Ia menjelaskan sifat kemanusiaan ialah kepercayaan pada persamaan, keadilan serta kesanggupan kerja sama antara sesama manusia sebagai dasar kehidupan di dalam pergaulan.

Akhir bulan Juni 1955 Partai Sosialis Indonesia (PSI) menyelenggarakan Kongres II. Pada Kongres tersebut, Partai Sosialis Indonesia (PSI) mempertimbangkan nilai partisipasi dalam Pemilihan Umum. Sebagian besar pemimpin tetap menginginkan tujuan utama pada pembangunan kader. Walaupun demikian, tetap diputuskan untuk aktif berkampanye dan ikut Pemilihan Umum.

Partai Sosialis Indonesia (PSI) mengalami kekalahan pada Pemilihan Umum pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dalam analisis Sutan Sjahrir, faktor kekalahan bukan karena program Pemilihan Umum yang kebarat-baratan atau terlalu rasional sehingga dianggap aneh. Ketika ternyata

Partai Komunis Indonesia hanya memperoleh 16% suara, maka menurut Sjahrir rakyat Indonesia tetap berorientasi kepada demokrasi karena partai-partai demokratik yang lain memperoleh suara besar.²⁵ Menurut Hamid Algadri, rakyat Indonesia belum siap untuk menerima program-program Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena diformulasikan dalam cara yang terlalu intelektual. Walaupun demikian, dengan mengikuti Pemilihan Umum setidaknya memperlihatkan orientasi politik yang menjunjung tinggi demokrasi. Partai Sosialis Indonesia (PSI), bila dilihat dari kuantitas keanggotaannya merupakan partai kecil di Indonesia, yang hanya memperoleh 2% suara total dalam pemilihan umum pada bulan September 1955, tapi secara kualitas merupakan partai yang mempunyai pengaruh besar. Pada hemat Sjahrir, kelemahan Partai Sosialis Indonesia (PSI) disebabkan karena keliru menghitung kematangan dan kesadaran politik para pemilih, khususnya yang mudah didominasi oleh otoritas keagamaan dan kepomongprajaan.

Pemilihan umum tahun 1955 menghasilkan partai politik Empat Besar yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi, PKI (Partai Komunis Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama). Sedangkan Partai Sosialis Indonesia merosot menjadi partai kecil. Kegagalan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam pemilu, menurut pendapat sebagian para penganalisa, adalah karena gagasan-gagasan Sjahrir terlalu bersifat elitis yang hanya dapat dipahami oleh sekelompok kaum intelektual saja, sedangkan sebagian rakyat tidak dapat mengikuti cara berpikir Sjahrir. Apa pun yang tidak menyenangkan telah dikatakan tentang Sjahrir, betapa pun dia diejek oleh lawan-lawan politiknya, satu hal yang patut diakui: Sjahrir telah berusaha merumuskan, apa itu ideologi yang dinamakan “Sosialisme Kerakyatan”²⁶

Pada tanggal 15 Februari 1958 PRRI (Pemerintah Revolusioner RI) dibentuk di Padang dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai PM/Menteri Keuangan oleh Dewan Perjuangan pimpinan Letkol Ahmad Husein. Peristiwa tersebut telah didahului oleh berbagai tahap dengan pembentukan Dewan Gajah di Medan, Dewan Banteng di Padang dan Dewan Garuda di Palembang. Dewan-dewan ini pada awalnya bertujuan sebagai gerakan pembangunan daerah. Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) diikrarkan (meneguhkan janji) di Makassar pada tanggal 2 Maret 1957, dipelopori oleh Letkol H.V.N. Sumual, Letkol Saleh Lahade dan sejumlah tokoh masyarakat. Tujuan utamanya adalah pembangunan Indonesia wilayah Timur berdasarkan otonomi luas.

Gerakan PRRI (Pemerintah Revolusioner RI)-Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) yang menentang Pemerintah Pusat muncul di daerah. Para Kolonel, seperti Simbolon, Ahmad Husein, Ventje Sumual merekrut tokoh-tokoh Masyumi-PSI seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoedin Harahap, Sumitro

Inisiatif Warga, UKM Media Parahyangan dan UKM Pusik Parahyangan, hal 4.

²² Ibid. hal 5

²³ Rudolf Mrázek. op. cit. hal 665

²⁴ H. Rosihan Anwar. 2010. Sutan Sjahrir : Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, KITLV Press. hal 113.

²⁵ P.Y. Nur Indro. op. cit, hal 125.

²⁶ H. Rosihan Anwar. op. cit. hal 111.

Djojohadikusumo dalam upaya mengganti Pemerintah Pusat²⁷

Pada bulan April 1957 Sukarno membentuk kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja, seorang politisi yang tidak bergabung dalam suatu partai. Alasan Sukarno memilih Djuanda antara lain karena terdapat permusuhan yang semakin dalam di antara partai-partai yang ada. Kabinet ini mengalami berbagai masalah yang mengarah kepada pergerakan nasional.

Berdasarkan kenyataan bahwa kabinet Djuanda tidak mampu menangani masalah-masalah yang terjadi, pada bulan Januari 1958 Partai Sosialis Indonesia menuntut pembentukan kabinet baru. Tuntutan tersebut ditolak oleh Sukarno, Partai Nasionalis Indonesia dan Nahdlatul Ulama berusaha terus mempertahankan kabinet Djuanda. Pada tanggal 10 Februari 1958 tuntutan pembubaran kabinet juga datang dari pertemuan di Padang antara para perwira militer dan para pemimpin Masyumi (Natsir dan Sjafrudin) serta Sumitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia.

Sjahrir telah menasehati anggota-anggota PSI bahwa mereka boleh aktif dalam gerakan pembangunan daerah tapi jangan melibatkan diri dalam aksi konfrontatif atau pertentangan terhadap Pemerintah Pusat. Sukarno dan A.H. Nasution mengirim tentara di bawah komando Kol. Ahmad Yani. Pada bulan Februari 1958, operasi gabungan pasukan payung dilancarkan ke lapangan terbang Pekanbaru. Ikut terjun seorang letnan baret merah, Benny Moerdani (Kelak menjadi Panglima ABRI). Pada tanggal 17 April 1958, pasukan ekspedisi gabungan TNI mendarat di pantai Sumatera Barat. Kota Padang kemudian segera diduduki. Tanggal 4 Mei, Bukittinggi dikuasai. Di Sulawesi, perlawanan Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) masih ada. Namun, jatuhnya Bukittinggi berarti ancaman PRRI-Permesta terhadap pemerintah pusat tidak lagi diperhitungkan.²⁸

Para pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang ada di Jakarta tidak berhasil mencegah munculnya pemerintahan pemberontak yang terkenal dengan sebutan PRRI (Pemerintah Revolusioner RI) yang bermarkas di Bukittinggi. Pada tanggal 17 Februari 1958 pemberontak Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) bergabung dengan PRRI (Pemerintah Revolusioner RI). Partai Sosialis Indonesia lebih mengutamakan dialog dalam mengatasi berbagai masalah oleh karena itu mereka tidak menyetujui dilakukannya pemberontakan tersebut.

Sehubungan dengan pemberontakan tersebut, pada tanggal 21 Juli 1960 Presiden Sukarno memutuskan Partai Sosialis Indonesia untuk mengemukakan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti ketidakterlibatannya dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner RI). Keputusan ini diberikan Presiden Sukarno kepada Sutan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo dan T.A Murad. Dari jawaban atas keputusan presiden tersebut akan terbukti Partai Sosialis Indonesia no.7 tahun 1959

Reaksi anggota-anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) atas keputusan Presiden tentang pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) tersebut tidak bersifat

revolusioner. Partai Sosialis Indonesia bereaksi secara demokratis dalam arti sangat menghargai pendapat orang lain. Dalam Tanya jawab, Partai Sosialis Indonesia sudah memberikan jawaban namun ditanggapi dengan pembubaran Partai Sosialis Indonesia dan jawaban ini adalah dari pemimpin negara maka Partai Sosialis Indonesia menerimanya dengan hormat. Hal ini terbukti dengan surat Partai Sosialis Indonesia No. K. 089/1960 kepada staf Penguasa Perang Tertinggi tentang permohonan ijin untuk mengadakan kongres karena wewenang untuk membubarkan partai ada pada Kongres Partai Sosialis Indonesia.

Pada tanggal 5 September 1960 Kepala staf Penguasa Perang Tertinggi memberikan jawaban terhadap permohonan Partai Sosialis Indonesia untuk mengadakan kongres. Jawaban tersebut tertuang dalam surat bernomor 0612/PEPERTI/1960 yang berisi penolakan ijin kepada Partai Sosialis Indonesia untuk mengadakan kongres. Alasan penolakan ijin tersebut adalah dikarenakan Partai Sosialis Indonesia telah dibubarkan. Maka satu-satunya aktivitas yang dapat diakui dari Partai Sosialis Indonesia adalah mengeluarkan pernyataan yang dilakukan pemimpin partai bahwa partai mereka bubar.

Partai Sosialis Indonesia menerima keputusan tersebut dengan baik dalam surat dari Sekretariat Jenderal Partai Sosialis Indonesia kepada anggota yang berisi pernyataan bahwa cabang-cabang dan segenap rantingnya hendaklah mentaati keputusan Presiden no. 201 tahun 1960. Selain itu Partai Sosialis Indonesia telah menyatakan bubar dan hal tersebut dapat dipahami dalam radiogram (berita melalui radio) dari Kasi Sekretariat Staf Penguasa Perang Tertinggi.

Dalam segala hal yang berbau penyelewengan politik, Partai Sosialis Indonesia menjadi sasaran empuk propaganda hitam dari pihak partai-partai lain. Upaya yang dijalankan untuk membenahi organisasi, keanggotaan, ideologi Partai Sosialis Indonesia tidak juga membawa hasil memuaskan. Sjahrir menghadapi tantangan-tantangan, semakin kentara bahwa politik tidak berpihak kepada Sjahrir.

Upacara besar ngabenan, pembakaran jenazah bekas raja Gianyar menurut adat Bali berlangsung tanggal 18 Agustus 1961. Anak Agung Gde Agung, putra raja, mantan Menteri Luar Negeri dalam kabinet Boerhanoedin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956) mengundang teman-temannya untuk menghadiri ngabenan. Tamu-tamu tersebut adalah Hatta, Sutan Sjahrir, Moh Roem, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Sutan Hamid II Alkadri dari Pontianak.²⁹ Upacara berlangsung lancar dan juga ramai. Menteri Luar Negeri yaitu Subandrio dalam kedudukannya sebagai Kepala Pusat Intelijen menerima laporan rahasia bahwa di Bali telah terjadi persekongkolan subversif yang ditujukan ke alamat negara. Laporan diteruskan oleh Subandrio kepada Presiden Sukarno. Cerita konspirasi atau persekongkolan di Bali itu kemudian menyebar pada masyarakat.

Tanggal 7 Januari 1962, Presiden Sukarno berkunjung ke Makassar. Sebuah granat dilemparkan ke

²⁷ H. Rosihan Anwar. Ibid. hal 123

²⁸ H. Rosihan Anwar. op. cit. hal 125.

²⁹ H. Rosihan Anwar. op. cit. hal 132.

arah iring-iringan mobilnya. Tidak ada korban yang tewas. Tanggal 15 Januari, dua warga negara Belanda ditangkap karena dianggap ingin mencelakai Presiden Sukarno.³⁰ Pada tanggal 16 Januari 1962, pukul 4 pagi, pemerintah menangkap Sjahrir dirumahnya di Jalan Jawa No. 61 (sekarang, H.O.S. Cokroaminoto). Juga ditangkap Anak Agung Gde Agung, Soebadio Sastrosatomo, Sultan Hamid II Alkadri dari Pontianak. Selanjutnya tokoh-tokoh Masyumi: Prawoto Mangkusasmito, Yunan Nasution, Kiai H. Isa Anshary, dan Moh Roem.³¹

Pada tahun 1958 sehubungan dengan pemberontakan di Sumatera menurut Jeannes S. Mintz dalam bukunya yang berjudul Mohammed, Marx and Marhaen: the Roots of Indonesian Socialism, pemimpin-pemimpin Partai Sosialis Indonesia terbagi menjadi dua, di satu pihak ikut dalam pemberontakan tersebut, sedangkan di pihak lain mengutuk pemberontakan tersebut. Pihak yang tidak menyetujui pemberontakan mengeluarkan himbuan untuk menghindari terjadinya perang saudara. Sikap politik yang sangat menonjol dari Partai Sosialis Indonesia adalah selalu merasa ketakutan adanya kemungkinan negara Indonesia mengalami degenerasi (kemunduran atau kemerosotan generasi).³²

Surat perintah untuk menahan Sjahrir, dikeluarkan oleh Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) yang dipimpin oleh Sukarno. Dokumen ditandatangani oleh Subandrio sebagai menteri luar negeri dan Nasution sebagai menteri pertahanan. Nasution yang mendengar beberapa hari setelah surat perintah dikeluarkan, menyatakan bahwa dia harus menerima ketentuan dalam peristiwa tersebut. Nasution juga berkata kepada Soedjatmoko yang kemudian ditulis dalam memoarnya, bahwa:

“Sebenarnya Sukarno yang berada di belakang perintah penangkapan yang diberikan kepada Nasution dengan nama-nama belum diisi dalam dokumen dan meminta Nasution untuk menandatangani kertas seperti adanya”.³³

Dengan keragu-raguan, bahkan beberapa di antara teman-teman Sjahrir yang paling dekat dan sudah lama menjadi pengagumnya, membicarakan masa-masa terakhir dan tulisan Sjahrir dari penjara khususnya, tentang kemunduran intelektualnya. Analisisnya, menurut mereka kadang-kadang kabur, perhatiannya tidak menentu, bahasanya datar. Menurut teman-temannya hal tersebut sangat menyedihkan, ketika tulisannya dibandingkan dengan apa yang dihasilkan Sjahrir selama tahun 1930-an dan 1940-an.³⁴

D. Penutup

a. Kesimpulan

Sutan Sjahrir merupakan panutan bagi bangsa Indonesia. ketika dia melanjutkan pendidikannya di

Bandung tahun 1926, sikap kepeduliannya sudah tampak ketika melihat keadaan rakyat Indonesia yang sangat menderita dan juga tidak mampu terutama kaum kuli yang menderita akibat penjajahan kolonial. Sjahrir merupakan perpaduan antara ketajaman ilmu pengetahuan dan kedalaman batin. Ia mampu hidup dalam ketegangan antara global dan lokal.

Ketika Jepang menjajah Indonesia, Sjahrir sudah memprediksi bahwa bangsa Jepang tidak akan bertahan lama berada di Indonesia.

Setelah dua bulan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, Sjahrir merasa bahwa kemerdekaan tersebut hanyalah untuk kepentingan negara, bangsa dan juga untuk kepentingan politik. Bagi Sjahrir tidaklah cukup jika suatu negara sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain tetapi dalam masyarakat masih ada orang yang hidup miskin.

Politik yang ingin diterapkan Sjahrir ditujukan lebih untuk mengutamakan kebebasan manusia dan kepentingan masyarakat daripada kemerdekaan nasional. Walaupun negara Indonesia sudah mencapai kemerdekaan tetapi masih ada hal yang jauh lebih penting yaitu perdamaian, kemakmuran, dan juga kemajuan bagi rakyat.

Sutan Sjahrir memang bukanlah sekedar seorang politikus. Dia adalah seorang negarawan, yakni warganegara yang dalam pengabdianya yang luar-biasa terhadap Negara dan Bangsa, tidak menyandarkan pikiran dan langkah-langkahnya pada patokan kekuasaan

Sjahrir bukan hanya sekedar Politikus tetapi ia adalah seorang Negarawan yang memikirkan bagaimana kehidupan generasi yang akan datang. Dia bukan hanya sekedar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat terbebas dari penjajahan bangsa lain tetapi bagaimana caranya untuk memperoleh kemerdekaan bagi masyarakat kecil secara individu.

Apa yang Sjahrir takuti di masa kejayaannya dimana rakyat Indonesia membenci bangsa asing bahkan bangsanya sendiri bukan hanya terjadi pada sebelum atau pun sesudah kemerdekaan Indonesia, tetapi sampai sekarang sikap saling memusuhi bangsa sendiri masih dirasakan hingga saat ini.

Tidak cukup hanya menempatkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Begitu juga menempatkan Sjahrir hanya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia atau pimpinan partai sosialis, gelar itu terlalu kecil bagi Sjahrir.

Bagi Sjahrir, analisis politik perlu daya pikir yang kuat sekaligus keteguhan hati pada keadilan. Dengan daya pikir itu politik merupakan pendidikan demokrasi, bukan perburuan, pembesaran, dan pelanggaran kekuasaan. Ketika Pemilu tahun 2009 dilaksanakan, banyak para politikus untuk dapat menarik simpati rakyat, mereka yang secara terang-terangan menghasut rakyat dengan mengiming-imingi berbagai hal untuk kepentingan masyarakat kecil.

Sangat diharapkan bagi bangsa Indonesia untuk saat ini dan juga untuk masa mendatang, pemimpin negara yang seperti Sutan Sjahrir, yang lebih memperhatikan

³⁰ H. Rosihan Anwar. op. cit. hal 134

³¹ H. Rosihan Anwar. Ibid. hal 137.

³² P.Y. Nur Indro. op. cit. hal 156.

³³ Rudolf Mrázek, op. cit. hal 817-818.

³⁴ Rudolf Mrázek, Ibid. hal 840.

kepentingan rakyatnya bukan untuk mencari muka supaya mendapat perhatian rakyat tetapi sikap ketulusan yang merasa senasib sepenanggungan dengan rakyat kecil. Percuma jika suatu negara telah merdeka tetapi kemerdekaan bagi rakyat kecil sendiri belum terwujud, terutama kemerdekaan atas persamaan derajat.

b. Saran

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa perjuangan Sjahrir sangat luar biasa dan hal itu seharusnya bisa dicontoh oleh para pemimpin bangsa saat ini, pemimpin bangsa harusnya bisa memerdekakan rakyatnya sebagaimana merdeka yang dimaksud oleh Sjahrir yaitu Merdeka yang sebenarnya harus dimulai dari mensejahterakan rakyat dari keterbelakangan mental dan juga perekonomian. Hal ini memang sudah terlaksana, namun dalam beberapa kasus masih belum merata. Seharusnya para pemimpin bisa mendata kembali hal apa saja yang diperlukan untuk meratakan kesejahteraan rakyat. Sjahrir berpendapat jika Apa yang diinginkan rakyat tidak bisa terpenuhi, berarti nasionalisme telah gagal, hal ini menjadi faktor negara yang konservatif dan reaksi terhadap sesuatu yang negatif dan akan mengakibatkan keegoisan, mensejahterakan dirinya sendiri, dan tidak memperdulikan orang-orang di sekeliling. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di negeri ini, dan Indonesia harus berbenah diri untuk memperbaiki hal tersebut supaya masyarakat bisa hidup makmur dan sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Cut Junianty Syahra. 2012. *Pemikiran Politik Soetan Sjahrir*
Muhnizar Siagian. *Peranan Sutan Sjahrir Untuk Diplomasi Indonesia (1945-1947)*

Buku

- Abdullah Taufik, 1994, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
Basuki Suwarno, 1999, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*, Upakara, Jakarta.
Deliar Noer, 1997, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Jilid Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Djoeir Moehamad, Mochtar Lubis (ed), 1997, *Memoar Seorang Sosialis*, Obor, Jakarta.
Ebenstein, William dan Edwin Folgeman, 1987, *Isme-isme Dewasa ini*. Erlangga, Jakarta.
Franz Magnis Suseno, 2001, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisioner*, Gramedia, Jakarta.

- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto (ed), 1982, *Pemahaman Sejarah Indonesia (Sebelum dan Sesudah Revolusi)*, Lp3ES, Jakarta.
Gottschalk, Louis, 1975, *Mengeri Sejarah*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Hongo Laurentius K. 1980, *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.
Jassin H.N. 1990, *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djambatan.
Kahin, 1995, *George Mc Turnan, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, UNS, Surakarta.
Legge, J.D, 1993, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
M. Dagun, Save, 1997, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LPKN, Jakarta.
Mandalaram Syabuddin. *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*. Jakarta: Rosda Jaya Putra, 1987.
Mrázek, Rudolf, 1996, *Sjahrir; Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Panitia Konferensi Internasional, 1997, *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, Gramedia, Jakarta
P.Y. Nur Indro. 2009, *Pemikiran Politik Soetan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia: Tentang Sosialisme Demokrat, Inisiatif Warga, UKM Media Parahyangan dan UKM Pusik Parahyangan*, Bandung.
Rosihan Anwar, H (ed), 1980, *Mengenang Sjahrir*, Gramedia, Jakarta.
Rosihan Anwar, H., *Sukarno-Tentara-PKI 2006, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Obor, Jakarta.
Rosihan Anwar, H, *Sutan Sjahrir 2010, Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan*, PT Kompas Media Nusantara, KITLV Press. Jakarta.
Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta.
Sartono Kartodirdjo, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru ; Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Gramedia, Jakarta.
Sutan Sjahrir, 2000, *Pikiran dan Perjuangan*, Jendela, Yogyakarta.
Sutan Sjahrir, 1982, *Sosialisme Indonesia Pembangunan*, Leppenas, Jakarta.
Sutan Sjahrir, 1994, *Perjuangan Kita*, Guntur 49, Jakarta.
Sutan Sjahrir, 1967, *Sosialisme dan Marxisme*, Jembatan, Jakarta.
Solichin Salam, *Sjahrir Wajah Seorang Diplomat*, S. T. Rais Alamsjah, 1952, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*, Mutiara, Padang.
Syahbuddin Mandalaram, 1987, *Apa dan Siapa Sutan Sjahrir*, Rosda Jayaputra, Jakarta.
Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed), 2004, *Sejarah Tokoh Bangsa*, Lkis, Yogyakarta.

Majalah dan Koran

- Tempo, Edisi Khusus, 2009.
Jakarta Post, Tuesday, March 10, 2009.
Seputar Indonesia, Kamis 5 Maret 2009.